

Gunung Djati Conference Series, Volume 10 (2022)
ISLAMIC RELIGION EDUCATION CONFERENCE
I-RECON 2022

ISSN: 2774-6585

Website: <https://conferences.uinsgd.ac.id/index.php/>

Penguatan Humanisme Pendidikan Agama Islam dalam Mewujudkan Merdeka Belajar di Era *Society 5.0*

Novita Nur Hamidah¹⁾, Suwantoro²⁾

¹⁾IAIN Madura, Pamekasan, 69371

Email: novita,nurh23@gmail.com

²⁾IAIN Madura, Pamekasan, 69371

Email: wha.one31@yahoo.com

Abstract: *Through the Ministry of Education and Culture, the government of Indonesia made a new breakthrough in the form of a policy of independent learning to improve the education system. The idea of independent learning places a greater emphasis on a novel method of instruction that pays close attention to the requirements of the students. It is hoped that this policy will allow for "independence" from all educational activities, particularly learning, including Islamic Religious Education. In light of all of this, it is believed that humanism – the need to strengthen humanity's character – should not be eliminated from education, particularly in the age of society 5.0. Using descriptive, qualitative, and library research methods, this study sought to investigate the expansion of Islamic religious education's humanism toward the realization of the idea of independent learning in the age of Society 5.0. According to the findings of this study, Islamic Religious Education's humanism greatly contributes to the realization of the concept of independent learning without ignoring the students' humanity.*

Keywords: *PAI Humanism, Merdeka Belajar, Era Society 5.0*

Abstrak: Melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, pemerintah Indonesia membuat terobosan baru untuk memperbaiki sistem pendidikan berupa kebijakan merdeka belajar. Konsep merdeka belajar ini lebih menitikberatkan pada proses pembelajaran yang inovatif dengan sangat memperhatikan kebutuhan siswa. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan "kemandirian" dari segala upaya pendidikan, khususnya pembelajaran, termasuk pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Oleh karenanya, melihat semua itu, dipandang perlu penguatan karakter kemanusiaan – humanisme – sebagai komponen pendidikan yang tidak boleh dihilangkan, khususnya di era masyarakat 5.0. Dengan menggunakan metode deskriptif, kualitatif, dan penelitian kepustakaan, penelitian ini berusaha menyelidiki penguatan humanisme Pendidikan Agama Islam dalam mengimplementasikan gagasan belajar mandiri di era Masyarakat 5.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa humanism Pendidikan Agama Islam sangat memberikan kontribusi dalam mewujudkan konsep merdeka belajar dengan tanpa mengabaikan aspek kemanusiaan peserta didik.

Kata Kunci: *Humanisme PAI, Merdeka Belajar, Era Society 5.0*

PENDAHULUAN

Eksistensi pendidikan dalam kehidupan manusia diyakini sebagai sebuah fenomena antropologis yang orientasinya tidak lain diperuntukkan hanya untuk kebutuhan dan kepentingan manusia dalam menjalani, mempertahankan dan meningkatkan kualitas hidupnya, baik secara individu ataupun secara sosial. Melalui aktifitas pendidikan, harapannya bisa mewujudkan tatanan masyarakat yang bermartabat sekaligus mampu menghadapi segala bentuk dinamika kehidupan yang sedang dijalani ataupun di masa mendatang. Atas dasar ini, setiap pelaksanaan pendidikan dirasa perlu melakukan pembacaan dan pengkajian ulang terhadap situasi dan kondisi hidup manusia yang sangat kompleks sekaligus lengkap dengan ragam tuntutan eranya.

Dunia pendidikan saat ini harus merespon dengan cepat setiap perubahan yang dibawa oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Belum usai tantangan pendidikan di era 4.0 (*Information Society*) dengan upaya mengintegrasikan teknologi *cyber* baik secara fisik ataupun non fisik (Sabri, 2020: 2), kemudian datang kembali era 5.0, juga dikenal sebagai era masyarakat 5.0. Meskipun tidak ada banyak perbedaan dari sebelumnya, internet di 5.0 lebih dari sekedar cara untuk mendapatkan informasi; itu juga cara untuk hidup, sehingga perkembangan teknologi ini dapat membantu memecahkan masalah ekonomi dan ketidaksetaraan di masa depan. (Rostikawati, n.d., p. 25)

Perubahan-perubahan yang terjadi selama ini tidak dapat kita hindari, terutama yang diakibatkan oleh revolusi industri, yang berdampak pada struktur sistem pendidikan. Menurut Masdar Hilmy, industri dan pendidikan seperti dua sisi mata uang yang sama. Dunia pendidikan menciptakan industri dan sebaliknya industri memberikan inspirasi terhadap pelaksanaan pendidikan. (Hilmy, 2012: 2) Dengan demikian, agar tercipta suasana yang dinamis antara keduanya, maka pengelola pendidikan dan pihak terkait lain terutama pemerintah yang memiliki posisi strategis melalui segala bentuk kebijakannya bisa mengontrol pendidikan tetap pada jalurnya.

Sejalan dengan asumsi di atas, guna menyongsong setiap adanya revolusi industri ini, tepatnya di akhir tahun 2019 pemerintah melalui menteri pendidikan mencoba membuat wajah baru dalam dunia pendidikan dengan menjadikan kata “merdeka” sebagai konsep utamanya yang kemudian menjadi satu rumusan kebijakan Merdeka belajar kampus merdeka (MBKM). Kebijakan yang sangat visioner ini tentu menjadi harapan bersama guna membenahi pendidikan kita saat ini demi meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan.

Dari kebijakan tersebut, tentu saja bidikannya adalah semua pendidikan yang terprogram dan terencana layaknya sekolah dan perguruan tinggi. Bagi sekolah dengan penamaan “merdeka belajar” harapannya adalah terjadinya pembelajaran yang merdeka. Begitupun bagi perguruan tinggi dengan penamaan “kampus merdeka” diharapkan bisa mewujudkan aktifitas akademik yang merdeka dengan berbagai program yang sudah dicanangkan oleh menteri pendidikan.

Dalam konteks merdeka belajar, sebagaimana yang disampaikan oleh Menurut Siregar dkk. dalam Aan Widiyono dkk., siswa pada hakekatnya akan

memiliki kebebasan berpikir secara mandiri maupun kelompok, sehingga nantinya dapat menghasilkan siswa yang unggul, kritis, kreatif, inovatif, kolaboratif, dan partisipatif. Dengan kebijakan pembelajaran mandiri program, diharapkan siswa akan lebih terlibat dalam pembelajaran. (Widiyono et al., 2021: 103)

Rumusan kebijakan merdeka belajar ini, tentu akan menjadikan suasana pembelajaran tampak berbeda, tak terkecuali juga pada pembelajaran pendidikan agama islam di sekolah. Sebagai sebuah konsekuensi bagian dari kurikulum, maka sudah seyogyanya harus dinamis dan mampu beradaptasi dengan keadaan tanpa merusak fungsi dan Tujuan utamanya terdiri dari pengembangan akhlak, peningkatan taqwa, keimanan, dan akhlak siswa sesuai dengan tingkat kemampuannya. (Wathoni, 2018: 293)

Implementasi kebijakan merdeka belajar dengan segenap orientasinya sangat relevan dengan kebutuhan siswa sekaligus tuntutan pendidikan di era 5.0. meskipun pada sisi lainnya masih dinyatakan bahwa era 5.0 atau *Era super smart society* yang secara historisnya dipopulerkan oleh pemerintah Jepang pada tahun 2019 sebagai antisipasi gejolak dari disrupsi akibat revolusi industry 4.0 yang pada gilirannya akan menjadikan sebuah ketidak pastian yang bersifat kompleks dan ambigu, dikhawatirkan invasi dapat merusak nilai-nilai karakter manusia yang selama ini dijunjung tinggi. (Ariyanto & Wijoyo, 2021: 1) pada satu sisi lainnya, bisa kita katakan akan terjadinya degradasi peran manusia karena semuanya sudah tergantikan oleh teknologi.

Oleh sebab itu, demi mengantisipasi pudarnya nilai kemanusiaan sekaligus membantu terwujudnya merdeka belajar di era 5.0 yang sama-sama mengedepankan eksistensi manusia sebagai makhluk yang berpotensi, maka tepat sekali jika dilakukan penguatan humanism melalui pendidikan agama islam yang mendukung terhadap tercapainya tujuan pendidikan nasional..

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan atau library research yang mengumpulkan data dari berbagai sumber tulisan (literasi) yang memiliki keterkaitan dengan Penguatan Humanisme Pendidikan Agama Islam dalam Mewujudkan Merdeka Belajar di Era Society 5.0. kajian Pustaka secara umum diartikan sebagai upaya peneliti untuk menghimpun informasi baik dari buku ilmiah, laporan penelitian, jurnal ilmiah, ataupun sumber tertulis baik tercetak ataupun elektronik lainnya yang relevan dengan masalah yang akan atau sedang diteliti (Najamuddin & Metusalach, 2022: 51) pada tahap berikutnya, peneliti melakukan proses analisis, membandingkan kemudian menuangkan kembali sebagai bentuk informasi baru yang bisa dijadikan dasar dalam penelitian berikutnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Humanisme Pendidikan Agama Islam

Secara konseptual diyakini oleh semua orang bahwa pendidikan merupakan sebuah tindakan memperlakukan orang dengan kebaikan sehingga mereka bisa menjadi manusia seutuhnya. Manusia seutuhnya yang dimaksudkan disini adalah manusia yang menyadari akan fitrahnya sekaligus diaktualisasikan dalam kehidupannya. Keyakinan tersebut tentu tidak terlepas juga dari pemikiran humanis yang juga dijadikan sebagai dasar dalam pendidikan manusia.

Menurut A. Sudiarja dan Ashif Az-Zafi dalam Eka Nilam Safitri, humanisme adalah pandangan hidup yang mengakui bahwa manusia adalah makhluk yang unik dan istimewa. Memiliki struktur, kecenderungan, dan hubungan unik dengan orang lain. Cara hidup, cara berbahagia, dan cara bekerja semuanya memiliki ciri khas yang khas pada manusia. Begitulah gambaran umum manusia yang kurang lebih diterima di berbagai kalangan humanis. (Safitri & Az-Zafi, 2020: 81)

Pendidikan secara umum memang diperuntukkan kepada manusia. Pendidikan yang dimiliki oleh seseorang akan memberikan kontribusi besar dalam menentukan sekaligus memberikan warna tersendiri dalam hidupnya dalam menuju masa depan yang diimpakan sesuai kodrat manusia. sehingga dalam tataran praktis maupun konseptualnya tidak boleh mencidrai apalagi menghilangkan nilai-nilai kemanusiaannya. (dehumanisasi).

Pendidikan agama islam, dengan menjadikan ajaran islam sebagai pedomannya, tentu akan sangat menjunjung tinggi nilai dan martabat manusia sebagai hamba Allah. Marcel A. Boisard dalam Musthofah menyebutkan bahwa Ajaran Islam semata-mata bersifat kemanusiaan, bertujuan untuk menggerakkan dan mengatur seluruh umat manusia, terlepas dari perbedaan yang melekat pada dirinya. (Musthofa, 2021: 33) Dengan terlaksananya program pendidikan (agama islam), diharapkan mampu membantu atau memfasilitasi manusia dalam aktualisasi diri yang mengarah tidak hanya pada kebebasan semata melainkan juga pendekatan diri kepada Allah yang posisinya sebagai seorang hamba.

Dalam konteks ini, sutrisno dalam Ahmad Faozan mengelompokkan 2 macam paradigma pendidikan agama islam, yaitu PAI normative dengan pendekatan teologis dan PAI Humanis emperis dengan pendekatan antroposentris (berorientasi kepada manusia). dari keduanya kemudian ditawarkan PAI humanis religious yang memandang peserta didik sebagai subyek pendidikan dengan fokusnya pada problem-problem actual peserta didik sebagai subjek pendidikan. (Faozan, 2022: 79)

Oleh sebab itu, sudah seharusnya pendidikan agama islam dengan menjadikan humanisme sebagai jiwanya, akan tampak dengan aktifitas yang dinamis, tetap mengarah pada perkembangan, peningkatan potensi dan karakter kemanusiaan tanpa mengabaikan segala bentuk problematika kekinian yang diakibatkan oleh era dengan berbagai macam tuntutan.

B. Kajian Konseptual Tentang Merdeka Belajar

Menteri Nadiem Makarim mengemukakan gagasan belajar mandiri karena ingin menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan

menyenangkan tanpa harus mengikuti nilai-nilai tertentu atau menetapkan tujuan untuk sukses. Berfokus pada kemandirian sumber daya manusianya adalah salah satu konsep sentral dari kebijakan belajar mandiri. (Baro'ah:1065) Kemandirian dalam arti tidak memiliki kewajiban dan rasa takut. Kebijakan ini harus diterapkan di setiap satuan pendidikan, dari SD hingga SMP, karena berlaku secara nasional. Berikut poin kebijakannya yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sehubungan dengan gagasan belajar mandiri:

1. Ujian Sekolah Standar Nasional Dihapus (USBN)

Mulai tahun ini, Standar Operasional Prosedur (POS) pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) resmi dihentikan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Sebagaimana tertuang dalam Permendikbud Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ujian Diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional, penghapusan USBN merupakan amanat dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim. Akibatnya, sekolah akan bertanggung jawab penuh atas pembuatan soal dan pengelolaan USBN. Karena ujian diselenggarakan oleh sekolah, pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bertanggung jawab untuk memantau, mengevaluasi, dan memastikan bahwa ujian yang diadakan oleh sekolah berkualitas tinggi. Sekolah memiliki keleluasaan dan keleluasaan untuk menyelenggarakan ujian. Karena erat kaitannya dengan standar pendidikan, maka hal ini menjadi krusial. Agar ujian dapat dilaksanakan dengan lancar, Dikbud perlu memberikan pendampingan, khususnya dalam hal dari anggaran. Juga perlu diberikan pelatihan tentang cara membuat pertanyaan yang sesuai dengan standar atau kriteria yang diperlukan.

2. Ujian Nasional (UN) diganti dengan Penilaian Kompetensi Minimum (AKM)

Evaluasi pendidikan dasar dan menengah biasanya dilakukan dengan menggunakan Ujian Nasional. Dalam rangka penjaminan mutu di satuan pendidikan, UN merupakan salah satu upaya pemerintah. Sesuai dengan PP No.19 Tahun 2005 yang menitikberatkan pada Standar Nasional Pendidikan. Penilaian hasil belajar telah berlangsung selama beberapa dekade dan telah mengalami banyak transisi. Dalam beberapa tahun terakhir, Ujian Nasional muncul sebagai isu yang sangat kontroversial dan momok yang menakutkan. Ada banyak anggapan dan paradigma tentang Ujian Nasional, tetapi Menteri Pendidikan, Nadiem Makarim memutuskan tahun ini untuk menghapuskan UN. Karena kelulusan dari jenjang pendidikan tertentu tidak ditentukan oleh nilai yang diperoleh hanya dalam beberapa hari, diharapkan siswa tidak mengalami tekanan mental akibat dari penghapusan Ujian Nasional. Namun demikian, bukan berarti hasil belajar siswa tidak diukur sama sekali penilaian etensi dan survei karakter akan menggantikan UN dalam sistem baru. Ide ini adalah versi sederhana dari sistem UN. Berbeda dengan Ujian Nasional yang diambil di

akhir jenjang belajar anak, ujian ini akan diambil saat anak berada di kelas 4, 8, dan 11.

Selain itu, informasi yang dikumpulkan dari penilaian ini akan digunakan oleh sekolah untuk meningkatkan proses pembelajaran selanjutnya. Survei karakter, yang digunakan untuk menentukan karakter anak dan bagaimana lingkungan sekolah, akan diterapkan di samping penilaian kompetensi. Sekolah menggunakan survei karakter sebagai indikator atau tolak ukur untuk memberikan umpan balik pada kegiatan pembelajaran, terutama dalam hal penanaman nilai karakter pada siswa. Sehingga siswa pada akhirnya akan menginternalisasi nilai-nilai karakter, yang secara otomatis akan berpengaruh pada prestasi dan kualitasnya. (Baro'ah, 2020: 1067)

3. Penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Pedoman guru dalam mengajar adalah RPP atau disebut juga dengan RPP. Sebelum memasuki kelas, seorang guru harus mempersiapkan RPP agar siswa belajar lebih spesifik dan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Menurut Surat Edaran No 1, menteri pendidikan telah mengeluarkan kebijakan baru tentang penyusunan RPP.14 Tahun 2019 tentang Penyederhanaan RPP. Berbeda dengan RPP sebelumnya yang memiliki lebih dari sepuluh komponen, RPP baru telah disederhanakan, dengan hanya tiga komponen inti sejalan dengan Mendikbud. Surat Edaran Pendidikan No.14, khususnya penilaian atau penilaian, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, dan tujuan pembelajaran. Guru akan memiliki lebih banyak kebebasan untuk membuat dan melaksanakan RPP yang tetap diarahkan pada perkembangan anak sebagai akibat dari kebijakan ini. (Baro'ah, 2020, p. 1068)

4. Perluasan Sistem Zonasi Penerimaan Mahasiswa Baru

Proses penerimaan mahasiswa baru diatur dengan sistem zonasi yang didasarkan pada wilayah tempat tinggal. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menggunakan zonasi sebagai salah satu kebijakannya untuk memastikan bahwa semua siswa memiliki akses ke sumber daya pendidikan dan pemerataan kualitas pendidikan nasional. berbeda dengan sistem zonasi saat ini. Jelas, sistem ini telah ditinjau dan dipertimbangkan rekomendasi lembaga yang kredibilitasnya tidak dapat disangkal sebelum diterapkan.

Kuota mahasiswa dari jalur zonasi menjadi salah satu perbedaan utama antara sistem zonasi sebelumnya dengan era kementerian. Kuota minimum awal sistem zonasi adalah 80% dari total kuota, selebihnya dialokasikan untuk jalur pencapaian dan transfer. Dalam sistem zonasi saat ini, yang bergeser ke jalur zonasi 50 persen, afirmasi 15 persen, perpindahan 5 persen, dan jalur pencapaian 30 persen. Akibat kasus di beberapa daerah di mana sistem zonasi lama sulit diterapkan, persentase siswa yang bergerak melalui jalur prestasi awalnya meningkat dari 15% menjadi 30%. Dengan perubahan persentase ini, diharapkan mekanisme penerimaan mahasiswa baru dapat mengakomodir berbagai keadaan. di

setiap bagian. Zonasi ini tidak hanya mengatur bagaimana sekolah dan siswa didistribusikan, tetapi juga berfokus pada jumlah dan kualitas guru di suatu daerah yang nantinya menjadi kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah.

C. Kajian Konseptual Tentang Era Society 5.0

Konsep masyarakat yang berpusat pada manusia dan berbasis teknologi dapat diartikan sebagai era Society 5.0. Internet of Things (juga dikenal sebagai "internet untuk segalanya"), Kecerdasan Buatan (juga dikenal sebagai "kecerdasan buatan"), Big Data (juga dikenal sebagai "data dalam jumlah besar"), dan robot hanyalah beberapa dari inovasi yang dikembangkan selama revolusi industri keempat (juga dikenal sebagai "revolusi industri 4.0"). Society 5.0 adalah masyarakat yang mampu menyelesaikan berbagai tantangan serta masalah sosial. Manusia akan mampu menjalani kehidupan yang lebih bermakna sebagai hasil dari transformasi ini. (N.d., Adi Santoso)

Melalui Society 5.0, kecerdasan buatan (artificial intelligence) akan mengubah data besar yang dikumpulkan melalui Internet di semua bidang kehidupan (Internet of Things) menjadi kebijaksanaan baru yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan manusia dan menciptakan peluang untuk semua. Manusia akan memanfaatkan teknologi tersebut kemajuan untuk meningkatkan kualitas hidup, tanggung jawab sosial, dan pembangunan berkelanjutan.

D. Penguatan Humanisme Pendidikan Agama Islam dalam mewujudkan merdeka belajar di era Society 5.0

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, pendidikan tetap menjadi landasan bagi pembangunan manusia sesuai dengan fitrahnya, sekaligus juga manusia dijadikan sebagai rujukan dalam melaksanakan setiap jenjang pendidikan. Dalam konteks hari ini tentu pendidikan, terutama pendidikan agama islam harus lebih dinamis dan sensitive terhadap segala bentuk perubahan yang ada tanpa mengenyampingkan nilai-nilai kemanusiaan.

Menurut Mappanganro dalam Hafifuddin Harisa, pendidikan agama Islam dilandasi oleh dua landasan yang sangat esensial dan terpadu dalam menjawab seluruh persoalan umat manusia: teosentrisme dan humanisme, atau yang kita sebut humanisme-teosentris. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, pendidikan masih dijadikan landasan untuk menjamin agar manusia dapat berkembang sesuai dengan fitrahnya. Nilai-nilai yang fundamental dan objektif, seperti keseimbangan, nilai kodrat kemanusiaan, persatuan umat manusia, dan Islam sebagai rahmatan lil alamin, dapat diwujudkan. diterapkan dalam kehidupan manusia dengan landasan humanisme dan teosentrisme. (Harisah, 2018: 37)

Pesatnya perkembangan teknologi, tidak hanya sebagai sarana penyampaian informasi, menandai era masyarakat 5.0, seperti yang telah disebutkan sebelumnya saja melainkan sudah melebur menjadi bagian dari kehidupan manusia banyak pro kontrak yang dimunculkan dari hadirnya era

ini. Sebagian ada yang berpandangan pesimistik dan curiga, Sebagian ada yang berpandangan optimistic dan Sebagian lainnya berpandangan moderat atau bijaksana. (Nata, 2018: 3)

Terlepas dari pandangan tersebut, mengantisipasi akan dampak buruk dari era ini yang bisa saja akan berimbas pada hilangnya nilai-nilai kemanusiaan, maka sangat diperlukan penguatan humanisme dalam pendidikan, termasuk pendidikan agama bagi umat Islam. Internalisasi kemanusiaan, humanisasi, dan demokrasi merupakan salah satu dari sekian banyak topik yang dibahas dalam pendidikan agama Islam yang berbasis pada sumber materi normatif Islam. (Khobir et al., 2019: 49) Maka dari itu, dibutuhkan penguatan terhadap nilai-nilai tersebut agar esensi sebagai manusia tidak hilang karena tergantikan oleh canggihnya teknologi.

SIMPULAN

Dari paparan dari atas dapat kami simpulkan bahwa pendidikan pada umumnya adalah sebuah ikhtiyar dalam memanusiakan manusia secara manusiawi. Hal yang sedemikian membeirikan gambaran bahwa tidak dibenarkan sekali apabila dalam tataran teoritis ataupun aplikatifnya pelaksanaan pendidikan mencidrai nilai kemanusiaan itu sendiri. Begitu pula dengan pendidikan agama Islam. Yang sejatinya sudah berdasarkan atas Al-quran dan al-hadits maka sudah pasti sangat menjunjung tinggi akan eksistensi manusia. Sehingga, menjadi tugas wajib bagi pendidikan (agama) Islam untuk memperbaiki kembali system pendidikan yang mengarah pada dehumanisasi.

Menteri pendidikan datang dengan proposal kebijakan baru yang disebut "kebebasan untuk belajar.", memiliki porsi penting dalam membangun dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di Indonesia. Dengan sebuah konsep "merdeka belajar" Diharapkan dapat menjadi respon baik terhadap revolusi industri yang kini memasuki era masyarakat 5.0, dan landasan bagi perubahan yang memperbaiki sistem pendidikan.

Di zaman sekarang ini, dengan menjadikan internet tidak hanya sebagai sumber informasi tetapi juga komponen penting dalam kehidupan sehari-hari, dalam melangsungkan hidupnya. Agar tidak terjadinya pergeseran ataupun hilangnya nilai kemanusiaan dalam diri manusia maka perlu dilakukan penguatan kembali terhadap nilai-nilai kemanusiaan tersebut yang salah satunya bisa dilakukan dengan melalui pendidikan agama islam yang diberikan di bangku sekolah.

REFERENSI

- Adi Santoso, K. (n.d.). *Pendidikan untuk Menyambut Masyarakat 5.0 – YASKUM INDONESIA*. Retrieved July 28, 2022, from <https://yaskum.info/pendidikan-untuk-menyambut-masyarakat-5-0/>
- Ariyanto, A., & Wijoyo, H. (2021). *Membangun SDM Tangguh di Tengah Gelombang*. Insan Cendekia Mandiri.

- Baro'ah, S. (2020). Kebijakan merdeka belajar sebagai strategi peningkatan mutu pendidikan. *Jurnal Tawadhu*, 4(1), 1063–1073.
- Faozan, A. (2022). *Wacana Intoleransi dan Radikalisme dalam Buku Teks Pendidikan Agama Islam*. Penerbit A-Empat.
- Harisah, A. (2018). *Filsafat Pendidikan Islam Prinsip dan Dasar Pengembangan*. Deepublish.
- Hilmy, M. (2012). Nomenklatur baru pendidikan Islam di era industrialisasi. *Tsaqafah*, 8(1), 1–26.
- Khobir, A., Jaeni, M., & Basith, A. (2019). *Multikulturalisme dalam Pandangan Ulama Nusantara*. Penerbit NEM.
- Musthofa. (2021). *Humanisasi Pendidikan Pesantren – Rajawali Pers*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Najamuddin, I., & Metusalach, I. (2022). *Metode Penelitian Perikanan Tangkap*. Nas Media Pustaka.
- Nata, A. (2018). Pendidikan Islam di era milenial. *Conciencia*, 18(1), 10–28.
- Rostikawati, D. (n.d.). *Kepemimpinan Di Era Revolusi Industri 5.0*. Cipta Media Nusantara.
- Sabri, A. (2020). *Pendidikan Islam Menyongsong Era Industri 4.0*. Deepublish.
- Safitri, E. N., & Az-Zafi, A. (2020). Konsep Humanisme Ditinjau dari Perspektif Pendidikan Islam. *Al-Murabbi: Jurnal Studi Kependidikan Dan KeIslaman*, 7(1), 78–89.
- Wathoni, L. M. N. (2018). *Integrasi Pendidikan Islam dan Sains: Rekonstruksi Paradigma Pendidikan Islam*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Widiyono, A., Irfana, S., & Firdausia, K. (2021). Implementasi merdeka belajar melalui kampus mengajar perintis di sekolah dasar. *Metodik Didaktik: Jurnal Pendidikan Ke-Sd-An*, 16(2).